

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemerdekaan Indonesia yang telah diraih pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan, namun justru merupakan sebagai langkah awal dalam menata kehidupan bernegara. Kemerdekaan merupakan awal dari perjuangan sebuah negara untuk mempertahankan integrasi bangsa. Sebagaimana Soekarno mengatakan, "...dengan demikian berakhirlah masa perjuangan kami, dan dengan demikian pula dimulainya perjuangan kami untuk memepertahankan kelangsungan hidup...".¹ Euforia kemerdekaan yang dialami rakyat Indonesia dengan merebut perusahaan-perusahaan Belanda telah membuat mereka kalut sehingga melupakan sisi lain yang harus diperhatikan, yaitu sebuah keterampilan dalam mengelola perusahaan-perusahaan tersebut. Pada akhirnya, etnis Tionghoa sebagai golongan yang memiliki keterampilan berhasil mendominasi perekonomian. Dominasi bisnis yang dikuasai oleh etnis Tionghoa mulai dari toko-toko, kios-kios kecil sampai bisnis besar banyak dikuasai oleh etnis Tionghoa, sedangkan kaum pribumi mengalami kesusahan dalam perekonomiannya. Masalah lain muncul ketika orang-orang Tionghoa cukup tertutup dan memisahkan diri sehingga membuat pribumi semakin sulit menemukan celah dalam perekonomian. Kesenjangan ini tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, maka pemerintah mencanangkan berbagai kebijakan perekonomian guna melindungi perekonomian pribumi.² Maka dicetuskanlah Kebijakan Ekonomi Assaat yang lebih dikenal sebagai Gerakan Assaat yang diprakarsai oleh Assaat. Assaat lahir di Sumatera Barat pada 18 September 1904. Assaat memiliki gelar kebangsawanan, yaitu Datuk Mudo. Assaat merupakan tokoh yang menjabat sebagai Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia sejak 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950. Beliau menempuh pendidikan

¹ Donald Wilhelm, *Indonesia Bangkit* (Jakarta: UI-Press, 1981), hlm. 28.

² Ratna Puspitasari, Multikulturalisme Dalam IPS: Pengenalan Relasi Sosial Etnis Tionghoa Dalam Integrasi Bangsa (Studi Kritis Kajian Relasi Gender Antar Etnis di Indonesia) (*Jurnal Edueksos, III*, 2, 2014), hlm. 3.

dari mulai Sekolah Agama Adabiyah di Padang, MULO (*Meer Uitbreid Lager Onderwijs*) Padang, kemudian pindah ke STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*), kemudin pindah ke AMS (*Algemeene Middelbare School*) dan melanjutkan ke RHS (*Rechts Hoge School*). Assaat kemudian pindah ke Universitas Leiden dengan menempuh pendidikan di bidang Hukum. Setelah berhasil menempuh pendidikannya tersebut, Assaat mendapat gelar Mr. (*Meester in de Rechten*) atau Sarjana Hukum. Maka dari itu, Assaat disebut sebagai Mr. Assaat.³ Mr. Assaat sebagai pembicara pada acara kongres Importir Nasional yang diselenggarakan di Surabaya turut angkat bicara mengenai kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu, yaitu pada 1956. Beliau mengungkapkan bahwa etnis Tionghoa begitu eksklusif dan memonopoli perekonomian.⁴

Kondisi perekonomian tersebut cukup menggambarkan perbandingan antara etnis Tionghoa dengan pribumi. Sebagaimana dalam potongan pidato Presiden Soekarno yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita mengungkapkan, "...pendek kata kita bergerak karena ingin perbaikan nasib di dalam segala bagian-bagiannya dan cabang-cabangnya..." namun di sisi lain Presiden Soekarno mengatakan bahwa "...segala kemacetan dan keseretan di *verklaar* dengan kata memang kita ini belum cukup matang, memang kita ini masih sedikit *inlander*".⁵ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tentu saja menginginkan kehidupannya lebih maju, namun dilema dengan kenyataan masih terlalu sedikit pribumi yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam perekonomian. Pada saat itu, Indonesia masih merintis masa depan bangsa dengan menjalankan sistem demokrasi parlementer.⁶

Perekonomian dan status sosial antara etnis Tionghoa dan pribumi yang telah terbentuk sejak pra kemerdekaan ternyata masih berlanjut hingga pasca

³ Puspasari Satyaningrum, *Mengenal Mr. Assaat, Datuk Mudo Asal Yang Pernah Menjadi Pj Presiden Republik Indonesia* (Kompas, 2023).

⁴ Ratna Puspitasari, *loc. cit.*

⁵ Presiden Soekarno, *Amanat Proklamasi III 1956-1960* (Jakarta: Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno, 1986), hlm. 96-100.

⁶ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Tonggak Penting Demokrasi Liberal yang Pernah Dialami Indonesia Era 1950an* (Tempo, 2022), hlm. 48.

kemerdekaan. Kenyataan tersebut tidak menyurutkan pemerintah Indonesia untuk membenahi perekonomiannya. Kebijakan perekonomian merupakan salah satu upaya pembenahan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang digagas oleh Mr. Assaat disampaikan saat pertemuan di Surabaya pada acara Kongres Importir Nasional Seluruh Indonesia pada 19 Maret 1956. Mr. Assaat mengungkapkan bahwa etnis Tionghoa telah memonopoli perekonomian Indonesia, sehingga membuat pribumi sulit mendapatkan akses perekonomian. Mr. Assaat percaya bahwa diperlukannya perlindungan perekonomian terhadap pribumi.⁷ Meskipun kebijakan tersebut telah dicanangkan, tetap saja keadaan perekonomian kaum pribumi tidak dapat menandingi usaha etnis Tionghoa. Gagasan yang dikemukakan Mr. Assaat mendapat dukungan dari sejumlah pemimpin politik bahkan terdapat yang mengajukan diperluasnya gagasan Mr. Assaat tidak hanya pada bidang perekonomian saja. Selain pemimpin politik, kabinetpun mendukung gagasan Mr. Assaat.⁸

Kebijakan ekonomi dari masa ke masa pada intinya dirancang guna mewujudkan kehidupan perekonomian masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan tersebut di antaranya ialah untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial di kalangan masyarakat. Pemerintah terus mengupayakan stabilitas ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan.⁹ Upaya dalam mewujudkan kebijakan ekonomi tentu saja tidak mudah, banyaknya rintangan dan tantangan yang dihadapi akan menghambat terwujudnya perekonomian masyarakat yang sejahtera. Kebijakan ekonomi bukan hanya tentang pemerintah mencanangkan sesuatu, namun tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang kebijakan tersebut. Sumberdaya manusia merupakan kunci dari keberhasilan

⁷ Ratna Puspitasari, *op. cit.* hlm. 3-4.

⁸ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Jakarta: Equinox Publishing, 2007), hlm. 484-485.

⁹ Yeni Wijayanti, Kebijakan Pemerintah Indonesia Masa Orde Lama Dibidang Ekonomi Terhadap Bisnis Orang Cina (*Jurnal Artefak*, 3(2), 2015), hlm. 114.

reformasi ekonomi, yaitu bagaimana cara menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi.¹⁰

Indonesia berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan berhasil membangun negara dengan sistem demokrasi yang merupakan cita-cita para pejuang kemerdekaan pada masa penjajahan. Mereka meyakini bahwa demokrasi merupakan sistem yang ideal bagi masyarakat Indonesia.¹¹ Namun dalam menjalankannya bukan berarti tidak ada lagi tantangan bagi bangsa Indonesia. Salah satu tantangannya ialah dalam upaya menata perekonomian nasional. Hal ini tampak nyata pada masa demokrasi parlementer. Pada masa multipartai inilah perekonomian Indonesia bergejolak. Demokrasi parlementer lebih menampilkan parlemen dan partai-partainya. Akibatnya ialah persatuan erat yang telah dibangun jauh-jauh hari pada saat melawan penjajah menjadi begitu rapuh dan menjadi sulit membentuk kekuatan yang konstruktif pasca kemerdekaan.¹²

Gagasan Mr. Assaat dikemukakan berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan, bahwa betapa monopolistisnya etnis Tionghoa dalam perekonomian. Terlepas dari hal itu, gagasan ini ternyata membuahkan kerusuhan anti etnis Tionghoa yang masif, ditambah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959 telah memperkuat masifnya gerakan anti etnis Tionghoa di Indonesia. Peraturan tersebut telah menimbulkan ketegangan dengan pemerintah Tionghoa, karena banyak etnis Tionghoa yang terkena imbas oleh peraturan tersebut, mereka banyak yang diusir dari kediamannya, diantara mereka terdapat yang melawan dan terdapat juga yang pasrah dengan peraturan tersebut, apalagi pelaksanaan peraturan tersebut dilaksanakan oleh militer.¹³ Gagasan yang diungkapkan oleh Mr. Assaat sebenarnya ialah sebagai upaya melindungi perekonomian pribumi terhadap etnis asing, bukan sebagai ujaran anti etnis

¹⁰ Didin S. Damanhuri dan Muhammad Findi, *Masalah dan Kebijakan: Pembangunan Ekonomi Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2014), hlm. 103.

¹¹ Ajip Rosidi, *Kemerdekaan jeung Demokrasi* (Bandung: Kiblat, 2010), hlm. 23.

¹² Sudarwanto Pujosantoso, *Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966)* (Pontianak: Derwati Press, 2018), hlm. 5.

¹³ Ratna Puspitasari, *op. cit.* hlm. 4-5.

Tionghoa. Di sisi lain, terdapat orang-orang yang membenci etnis Tionghoa yang kemudian secara tidak langsung membangkitkan perasaan anti etnis Tionghoa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dari pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959 terhadap etnis Tionghoa, kemudian Pemerintah Tionghoa menyampaikan protes terhadap kerusuhan yang menindas etnis Tionghoa yang tidak lain merupakan imbas dari Kebijakan Ekonomi Assaat. Pada 10 Desember 1959 radio Peking mengumumkan sebuah ajakan bagi Tionghoa perantauan untuk kembali ke Negeri Tiongkok. Segera Kedubes RRT di Jakarta mendaftarkan mereka (orang-orang Tionghoa) yang tertarik oleh ajakan tersebut. Orang-orang Tionghoa segera mendaftarkan, terdapat 199 ribu orang yang mendaftar, namun hanya 102 ribu orang yang berhasil pulang ke Tiongkok dengan menggunakan kapal yang telah disediakan pemerintah Tiongkok.¹⁴

Fakta-fakta yang terjadi di lapangan ketika pelaksanaan Peraturan tersebut menunjukkan bahwa kebencian terhadap etnis Tionghoa kian merebak, padahal Kebijakan Ekonomi Assaat yang merupakan salah satu kebijakan pada masa demokrasi parlementer seharusnya mewujudkan stabilitas perekonomian masyarakat Indonesia namun malah menimbulkan kerusuhan. Berdasarkan fakta-fakta di atas, penulis tertarik untuk mengajukan proposal penelitian mengenai kebijakan yang dicetuskan oleh Mr. Assaat. Dengan demikian, penulis memutuskan untuk mengajukan proposal penelitian yang berjudul Gagasan dan Kebijakan Ekonomi Assaat (1956-1959).

1.2 Rumusan Masalah

Penulis membuat suatu rumusan masalah yang berpijak pada topik masalah yang telah penulis buat. Rumusan masalah ini menjabarkan variabel yang terdapat pada topik masalah tersebut. Karena topik masalah ini hanya mengandung satu variabel, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Kebijakan Ekonomi Assaat 1956-1959 dilaksanakan?

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 5-6.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merumuskan pertanyaan penelitian dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat tahun 1956-1959?
2. Bagaimana proses penetapan gagasan Mr. Assaat menjadi Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959?
3. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Assaat 1959?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitiannya ialah:

1. Mengetahui kondisi perekonomian masyarakat tahun 1956-1959.
2. Mengetahui proses penetapan gagasan Mr. Assaat menjadi Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959.
3. Mengetahui pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Assaat 1959.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian mengenai pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Assaat diharapkan dapat lebih menggali peristiwa-peristiwa kebijakan perekonomian pada masa Orde Lama, khususnya pada masa demokrasi parlementer dan diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini lebih dalam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian mengenai pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Assaat diharapkan dapat menjadi penambah wawasan bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber rujukan bagi para peneliti selanjutnya. Karena ternyata masih sedikit sumber yang membahas Kebijakan Ekonomi Assaat secara khusus.

3. Manfaat Empiris

Penelitian mengenai Kebijakan Ekonomi Assaat diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dalam mengetahui perekonomian Indonesia masa Demokrasi

Parleментар. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi para pemangku kebijakan sebagai analisis dalam merancang suatu kebijakan ekonomi.

1.5 Tinjauan Teoretis

1.5.1 Kajian Teori

1.5.1.1 Kebijakan Ekonomi

Kebijakan merupakan sebuah instruksi dari pemerintah dan bukan hanya sebatas arti *government* yang mengaitkan aparatur negara saja, melainkan *government* yang mampu merangkul sumber daya publik. Kebijakan pada dasarnya merupakan sekumpulan yang terdiri dari keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan warga negara. Keputusan dan pilihan tersebut merupakan hasil dari adanya sinergi dari unsur-unsur yang terdiri dari berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan yang memiliki sistem politik suatu negara. Kebijakan juga merupakan penjelasan ringkas untuk menjelaskan berbagai kegiatan mulai dari pembuatan keputusan-keputusan, penerapan, dan evaluasinya. Maka, dapat didefinisikan kebijakan ekonomi adalah keputusan yang bertindak guna mengatur dan mengelola SDM dan SDA yang merupakan hasil dari sinergi dari berbagai gagasan dan ideologi sebagai upaya dalam membenahi dan menyelesaikan permasalahan perekonomian.¹⁵

Kemerdekaan Indonesia telah diraih pada 1945, namun ternyata belum memiliki suatu kebijakan resmi menyangkut ekonomi Indonesia. Pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949 juga menandai dimulainya proses Indonesianisasi dalam hal kepemimpinan dan sektor lainnya, termasuk tanah pertanian, perpabrik, produksi tambang, prasarana, angkutan, keuangan, dan perdagangan. Sasaran pertama adalah orang Belanda, tetapi tidak lama kemudian orang Tionghoa lokal menemui nasib yang sama. Hal ini karena pada masa penjajahan, orang-orang Tionghoa dijadikan perantara oleh orang-orang Belanda

¹⁵ Ali Mustajab, kebijakan politik Gus Dur Terhadap Cina Tionghoa di Indonesia (*In Right jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 5(1), 2015), hlm. 157.

dalam perekonomian dan mereka masih dianggap sebagai orang asing. Maka dari itu, setidaknya orang-orang Tionghoa banyak menguasai sektor perekonomian dan memiliki keterampilan serta pengalaman yang lebih dalam bidang perekonomian.¹⁶

Usaha yang dikelola oleh etnis Tionghoa ditentukan oleh kebijaksanaan penguasa. Jadi, mereka tidak menentukan peraturan perekonomian dengan semaunya. Maka dari itu, para pengusaha Tionghoa hanya dapat menarik manfaat, tetapi tidak dapat menjalankan siasat politis tertentu terhadap kebijakan penguasa. Kalaupun mereka dapat mempengaruhi penguasa, maka itu tidak lebih dari sebatas kepentingan bisnis mereka. Terdapat nilai-nilai penentu yang membuat orang-orang Tionghoa mampu menghadapi tantangan dalam bisnis mereka. Keberanian yang dimiliki pengusaha Tionghoa pada umumnya didukung oleh tiga nilai yang sering disebut sebagai penentu perilaku bisnis Tionghoa, yaitu *hopeng*, *hong sui*, dan *hoki*. Menurut Tani Handoko, *hopeng* adalah cara untuk menjaga hubungan baik dengan relasi bisnis. Kepercayaan terhadap *hong sui* adalah kepercayaan pada faktor-faktor yang menunjang nasib baik dan nasib buruk manusia. *Hoki* merupakan peruntungan nasib baik. Selain latar belakang orang-orang Tionghoa merupakan golongan kedua masa penjajahan, mereka pun merupakan orang-orang yang memiliki pengalaman cukup baik dalam menjalankan usahanya.¹⁷

Perekonomian dari masa ke masa semakin jelas dikuasai oleh asing, dalam hal ini ialah orang-orang Tionghoa. Kemudian kaum pribumi perlahan tersisihkan. Gagasan Mr. Assaat yang dituangkan dalam Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959 Tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Ketjil dan Etjeran Jang Bersifat Asing Di Luar Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Dan II Serta Karesidenan. Peraturan tersebut yang dilarang berjualan dengan ketentuan yang berlaku ialah ditujukan kepada orang asing, namun pada kenyataannya orang asing tersebut lebih dititikberatkan terhadap orang-orang Tionghoa. Orang asing yang diketahui

¹⁶ Yeni Wijayanti, *op. cit.* hlm. 115.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 116.

pedagang kecil saat itu berjumlah 86.960 pedagang, dan 90% merupakan para pedagang etnis Tionghoa, secara otomatis mayoritas dari mereka (etnis Tionghoa) terdampak peraturan tersebut.¹⁸

Negara bertugas menciptakan kesejahteraan yang merata pada semua golongan masyarakat. Negara tidak hanya mementingkan pada satu golongan atau individu saja, namun negara harus memperhatikan kesejahteraan individu dan masyarakat tanpa terkecuali, inilah yang kemudian dinamakan universalisme negara kesejahteraan. Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa negara memainkan peranan yang konstruktif dalam berbagai bidang, terutama dalam sektor perekonomian yang begitu vital dapat dipandang sebagai salah satu ciri dari perekonomian abad kedua puluh satu.¹⁹ Indonesia pada tahun 1956-1959 termasuk ke dalam masa demokrasi parlementer, untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut dilaksanakan oleh perdana menteri karena tanggungjawab pemerintahan terletak pada perdana menteri, sementara presiden hanya menjadi simbol. Meski demikian, presiden berwenang menyusun kabinet baru apabila terjadinya kumelut. Permasalahannya adalah kabinet sering kali jatuh bangun sehingga kebijakan-kebijakan tidak terlaksana secara tuntas.²⁰

Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia saat itu tentu saja harus diimplementasikan. Implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan. Implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah-masalah yang perlu diatasi dan dipecahkan, apabila tidak diatasi akan adanya penumpukan masalah sehingga masalah menjadi kompleks dan rumit. Pelaksanaan kebijakan tentu memiliki hambatan maupun pendukung dalam pengimplementasiannya. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan dirumuskan sebagai berikut: komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Keempat

¹⁸ Ratna Puspitasari, *op. cit.* hlm. 5.

¹⁹ Yulia Hafizah, Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau Dari Konsep Dasar Ekonomi Islam (*Millah*, IV(2), 2005), hlm. 34.

²⁰ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Edisi Khusus Kemerdekaan: Pergulatan Demokrasi Liberal, 1950-1959: Zaman Emas atau Hitam* (Tempo, 2019), hlm. 27.

faktor ini merupakan ciri yang harus terdapat dalam implementasi kebijakan.²¹ Selain dari pada itu, pemecahan permasalahan perekonomian dikaji dengan teori ekonomi makro, hal ini karena kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.²²

Teori ekonomi makro adalah alat bantu untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian secara nasional atau secara menyeluruh, seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, investasi, dll. Ekonomi makro dalam pelaksanaannya berjangka pendek dan terdapat 3 aspek tingkat kegiatan, yaitu kesempatan kerja, kegiatan ekonomi, dan tingkat harga umum. Alternatif dalam penyelesaian permasalahan perekonomian Indonesia yang terjadi pada tahun 1956 sehingga menimbulkan Gerakan Assaat adalah dengan menggunakan teori ekonomi makro.²³

1.5.1.2 Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah suatu aktifitas yang dilakukan secara terorganisir, namun jika dilakukan secara tidak terorganisir dinamakan perilaku kolektif. Contoh dari perilaku kolektif ialah, diantara partisipan suatu kerusuhan kemungkinan terdapat kerjasama dalam jangka waktu yang singkat ataupun waktu yang lama, namun keterlibatan partisipan dalam peristiwa kerusuhan tersebut bersifat bebas, sementara, dan merupakan kejadian yang tidak terorganisir. Tipikal partisipan dan pemimpin dalam suatu kerusuhan tersebut ialah datang begitu cepat dan pergi begitu cepat. Perilaku kolektif tidak memiliki tugas-tugas khusus yang harus dilakukan oleh partisipannya, sementara dalam gerakan sosial justru para partisipan diberi tugas, mereka tentu saja harus berhati-hati dalam merancang aksi agar sesuai dengan tujuan gerakannya. Perancangan tugas bagi para partisipan dilakukan oleh para pemimpinnya. Para partisipan yang terlibat seringkali

²¹ Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana (*Jurnal Administrasi Public*, 1(1), 2010), hlm. 2.

²² Masyhuri Machfudz dan Nurhadi Sujoni, *Teori Ekonomi Makro* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 4.

²³ *Ibid.*, hlm. 2-3.

dimotivasi oleh janji-janji,²⁴ inilah salah satu yang membuat para partisipan tertarik masuk ke dalam suatu gerakan sosial.

Locher menyatakan bahwa ketika sekelompok orang mengatur (mengorganisir) sebagai upaya mendorong ataupun menolak beberapa jenis perubahan sosial yang dianggap membuat tatanan kehidupan tidak stabil atau dianggap lebih buruk dari tatanan kehidupan sebelumnya, tetapi justru mereka sedang menciptakan sebuah gerakan sosial. Macionis menyatakan bahwa gerakan sosial adalah aktifitas yang diatur sebagai upaya mendorong atau menghambat terjadinya suatu perubahan sosial. Spenser menyatakan bahwa yang dimaksud gerakan sosial adalah upaya bersama yang ditujukan untuk menciptakan tatanan sosial yang baru. Klandermans mengambil dari pendapat Tarrow, menyatakan bahwa gerakan sosial adalah penentangan secara bersama yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan visi yang sama, melalui proses interaksi dengan berbagai pihak, seperti pihak elit, pihak lawan, dan pihak yang berwenang. Sujatmiko menyatakan bahwa gerakan sosial adalah aksi kolektif dengan orientasi pertentangan yang jelas terhadap lawan tertentu, dilakukan melalui lintas kelembagaan yang terikat oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat. Maka, dapat disimpulkan dari berbagai pendapat tersebut bahwa gerakan sosial adalah aktivitas terarah dan terorganisir yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan tatanan kehidupan yang baru.²⁵

Kehidupan sosial di Indonesia pasca kemerdekaan masih berusaha menata agar semuanya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam UUD 1945. Kebijakan-kebijakan digagas, ditetapkan, dan dilaksanakan, demi mewujudkan cita-cita negara. Perekonomian Indonesia menjadi salah satu hal vital yang harus dibenahi, tahun 1956 muncul Gerakan Assaat sebagai respon dari keadaan ekonomi pribumi saat itu. Gerakan ini merupakan gerakan sosial yang

²⁴ Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 12.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 14-16.

terorganisir, sehingga pada tahun 1959 gagasan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959. Keberhasilan gerakan sosial ditentukan oleh beberapa hal, yaitu: 1) Kepemimpinan, syarat keberhasilan gerakan sosial ialah kepemimpinan yang efektif, individu yang memiliki kriteria memahami sistem hukum dan politik secara efektif berfungsi dalam diri mereka. Para pemimpin gerakan sosial seyogyanya menitikberatkan perhatian terhadap tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan kelompok. Pemimpin gerakan sosial setidaknya harus memiliki kemampuan untuk memberikan dorongan kepada khalayak sehingga orang-orang tertarik untuk mengikuti aksinya. Gerakan Assaat yang digagas oleh Mr. Assaat memiliki kriteria sebagai pemimpin yang efektif, beliau merupakan tokoh negara yang paham hukum dan politik, serta kemampuan Mr. Assaat saat berorasi mengutarakan gagasannya tidak dapat diragukan; 2) Citra Positif, keberhasilan gerakan sosial juga ditentukan oleh pemimpin yang memiliki citra positif, sehingga dapat meyakinkan orang-orang bahwa pemimpin tersebut mampu meraih keberhasilan tujuan gerakan sosial.²⁶

Pemimpin gerakan sosial harus berusaha meyakinkan kepada semua pihak termasuk di dalamnya terdapat para politisi dan otoritas yang berwenang bahwa mereka adalah sekumpulan orang-orang baik, orang-orang jujur yang tidak lain hanya menginginkan suatu kebenaran. Citra publik mengenai kelompok dan pemimpin dari gerakan sosial harus dibangun sebaik mungkin sehingga selalu tampak positif. Mr. Assaat memiliki citra yang positif, dalam sejarahnya beliau pernah menggantikan posisi Presiden Soekarno di Yogyakarta. Beliau juga memiliki keahlian yang mumpuni dibuktikan dengan pengalamannya dalam bidang pemerintahan, salah satunya beliau pernah menjabat sebagai menteri dalam negeri; 3) Taktik, pemilihan taktik harus berdasar pada keefektifan dalam mencapai tujuan gerakan sosial.²⁷

Taktik yang digunakan Mr. Assaat ialah dengan menyuarakan gagasannya melalui orasinya pada Kongres Importir, hal tersebut efektif karena beliau

²⁶ *Ibid.*, hlm. 35-36.

²⁷ Oman Sukmana, *loc. cit.*

menyuarakan gagasan ekonomi pada tempat yang tepat. Gagasan tersebut sesuai dengan situasi perekonomian yang terjadi di masyarakat, yaitu orang-orang Tionghoa yang monopolistis dalam perekonomian dan tidak memberi ruang kepada pribumi. Maka dari itu, gagasan Mr. Assaat ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959; 4) Tujuan, gerakan sosial harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat diterima secara umum, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Tujuan dari gagasan Mr. Assaat adalah untuk melindungi perekonomian kaum pribumi, dengan fakta-fakta yang dikemukakan Mr. Assaat, tujuannya pun semakin jelas; 5) Dukungan, kebanyakan gerakan sosial mendapat dukungan politik dan dana dari jaringan politik, organisasi-organisasi dan institusi lainnya. Gerakan sosial yang berhasil pada umumnya mereka menghindari keterasingan dari pendukung politik dan finansial yang potensial akan mendukung gerakan sosial tersebut. Sementara gerakan sosial yang gagal, disebabkan mereka menyerang secara membabi buta semua orang termasuk menyerang pendukung potensial, baik dari segi politik maupun finansial. Dukungan yang diperoleh Mr. Assaat merupakan dukungan dari pemerintah, terbukti dengan ditetapkan gagasannya dalam Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959.²⁸

Gerakan sosial memiliki tahapan-tahapan untuk mencapai tujuannya, yaitu: 1) Tahap kemunculan, tahap ini didorong dengan anggapan segalanya tidak baik. Kebijakan Ekonomi Assaat muncul saat tatanan ekonomi ternyata dianggap tidak stabil; 2) Tahap penggabungan, proses gerakan sosial mulai menentukan arah, kebijakan, taktik, dan rekrutmen. Gagasan yang dikemukakan Mr. Assaat muncul sebagai protes perekonomian, kemudian setelah melewati berbagai proses, gagasannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah; 3) Tahap birokratisasi, tujuannya adalah agar menjadi sebuah kekuatan politik. Birokratisasi dalam gerakan sosial menjadikannya mapan, ketergantungan terhadap pemimpin akan berkurang; 4) Tahap kemunduran, kemunduran gerakan sosial disebabkan oleh:

²⁸ *Ibid.*

gerakan sosial dianggap telah berhasil mencapai tujuannya, gerakan sosial mengalami kegagalan, dan adanya tekanan dari luar. Kebijakan Ekonomi Assaat walaupun berhasil dilaksanakan namun mengalami kegagalan dalam mencapai tujuannya, hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya karena perencanaan dari SDM yang masih kurang matang.²⁹

Kebijakan Ekonomi Assaat dilaksanakan tahun 1959 pada akhirnya menimbulkan kerusuhan masa. Stolley menyatakan bahwa terjadinya kerusuhan merupakan jawaban terhadap beberapa fakta ketidakadilan, baik berupa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Sementara itu, Locher menyatakan kerusuhan adalah meletusnya kekerasan yang dilakukan masa dan terjadi secara tiba-tiba. Ketidakadilan ekonomi yang dirasakan pribumi terhadap etnis Tionghoa pada saat itu seolah memiliki ruang untuk mengekspresikannya melalui implementasi Kebijakan Ekonomi Assaat.³⁰

1.5.2 Kajian Pustaka

Penulis dalam melakukan penelitian ini tidak terlepas dari sumber-sumber sekunder berupa buku dan artikel ilmiah. Penulis menyajikan sumber-sumber rujukan sesuai dengan penelitian yang diteliti yaitu Kebijakan Ekonomi Assaat 1956-1959. Berikut merupakan tinjauan pustaka yang dilakukan oleh penulis.

Herbert Feith, *The Decline of Constitutional in Indonesia*. Buku tersebut pada bab kabinet Ali Sastroamidjoyo II menjelaskan munculnya Kebijakan Ekonomi Assaat dimulai dari Mr. Assaat mengemukakan pendapatnya berupa orasi di Kongres Importir Surabaya pada Maret 1956. Orasi Mr. Assaat yang tertuju pada etnis Tionghoa telah berpengaruh begitu luas baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat. Gagasan Mr. Assaat kemudian menjadi gerakan yang terorganisir dengan dibentuknya komite-komite di berbagai daerah. Artinya bahwa gagasan yang kemukakan Mr. Assaat berubah menjadi sebuah gerakan sosial yang terorganisir. Gerakan sosial tersebut timbul akibat dari kenyataan yang dinilai harus adanya perubahan. Selain berubah menjadi gerakan sosial, gagasan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 37-39.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 62-63.

Mr. Assaat kemudian ditetapkan ke dalam peraturan presiden menjadi Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959. Hal ini karena pengaruh orasi Mr. Assaat begitu masif dan beliau merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh.

Pengaruh dari gagasan Mr. Assaat terus berlanjut pada munculnya peristiwa-peristiwa yang bersinggungan dengan etnis Tionghoa yang cenderung menimbulkan anti etnis Tionghoa. Setelah pemerintah menentukan sikap terhadap gejolak yang terjadi, pada September 1956, pemerintah mendukung gagasan Mr. Assaat.

M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Buku ini menjelaskan adanya pelaksanaan kebijakan ekonomi yang di dalamnya terdapat campur tangan tentara. Karena pada masa Demokrasi Parlementer, pengaruh militer dalam pemerintahan cukup terlihat. Pelaksanaan kebijakan ekonomi tersebut terjadi pada tahun 1956. Tentara memindahkan etnis Tionghoa dari pedesaan ke perkotaan, bahkan mereka dipindahkan ke luar negeri, yaitu Tiongkok. Pemandahan tersebut dilakukan besar-besaran, yaitu sekitar 119 ribu orang berhasil dipindahkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kebijakan tersebut merupakan Kebijakan Ekonomi Assaat yang merujuk pada Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1956.

Ratna Puspitasari *Multikulturalisme Dalam IPS: Pengenalan Relasi Sosial Etnis Tionghoa Dalam Integrasi Bangsa (Studi Kritis Kajian Relasi Gender Antar Etnis di Indonesia)*, artikel ilmiah tersebut menjelaskan ketika Mr. Assaat berorasi di Surabaya dalam Kongres Importir Nasional. Mr. Assaat pada saat itu sebagai pembicara. Mr. Assaat mengungkapkan bahwa betapa monopolistisnya etnis Tionghoa dalam perekonomian Indonesia. Gagasan Mr. Assaat kemudian mendapatkan respon pro dan kontra di kabinet, namun pada perjalanannya, gagasan tersebut ditetapkan ke dalam peraturan presiden. Kebijakan Ekonomi Assaat kemudian dilaksanakan dengan rusuh, banyak etnis Tionghoa yang khawatir terhadap bisnisnya, mereka ada yang melawan namun juga terdapat pula yang diam karena takut terhadap tentara. Meski demikian, peraturan tersebut tetap harus dilaksanakan, karena Kebijakan Ekonomi Assaat merupakan wujud dari

nasionalisasi ekonomi Indonesia, di sisi lain, etnis Tionghoa menemui nasib yang kurang menguntungkan.

Pemerintah Tiongkok bereaksi terhadap pemindahan etnis Tionghoa, terlebih sampai memakan korban dalam pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1956. Duta Besar Tiongkok menyampaikan protes, namun peraturan tersebut tetap dilaksanakan. Walaupun pada peraturan tersebut kebijakan yang ditetapkan diperuntukkan orang asing, namun pada faktanya yang banyak terkena imbas ialah etnis Tionghoa. Hal ini karena kepemilikan bisnis pada saat itu didominasi oleh etnis Tionghoa.

1.5.3 Historiografi yang Relevan

Penulis menggunakan lima buah karya ilmiah sebagai penelitian yang relevan. Karya ilmiah tersebut berupa buku, skripsi, dan artikel ilmiah. Karya pertama ialah artikel ilmiah karya Ratna Puspitasari tahun 2014 yang berjudul *Multikulturalisme Dalam IPS: Pengenalan Relasi Sosial Etnis Tionghoa Dalam Integrasi Bangsa (Studi Kritis Kajian Relasi Gender Antar Etnis di Indonesia)* Jurnal *Edueksos*. Vol. III(1). Artikel ilmiah ini membahas mengenai multikulturalisme yang terjadi dalam pendidikan. Artikel ilmiah tersebut relevan dengan penelitian ini karena selain membahas mengenai etnis Tionghoa, namun di dalamnya juga membahas mengenai proses ditetapkannya gagasan Mr. Assaat menjadi Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959. Proses penetapan tersebut dimulai dari Mr. Assaat berorasi di Kongres Importir Surabaya, kemudian ditetapkan gagasan Mr. Assaat ke dalam Peraturan Presiden, sampai pada proses pelaksanaan kebijakannya pada November 1959.³¹ Perbedaan antara artikel ilmiah tersebut dengan skripsi ini ialah terletak pada fokus penelitian. Artikel ilmiah tersebut fokus terhadap etnis Tionghoa sebagai kajian utama penelitian. Sedangkan skripsi ini berfokus pada Kebijakan Ekonomi Assaat yang kemudian menimbulkan kerusuhan dan etnis Tionghoa mendapatkan imbas cukup besar dalam peristiwa ini diantaranya terdapat kebencian terhadap etnis Tionghoa.

³¹ Ratna Puspitasari, *op. cit.* hlm. 4-6.

Sedangkan persamaannya ialah terdapat pembahasan yang membahas mengenai pengalaman pahit etnis Tionghoa yang ada di Indonesia.

Historiografi yang relevan kedua ialah skripsi karya Nani Julita tahun 2018 yang berjudul *Sejarah Perekonomian Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1956-1960*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Skripsi tersebut memaparkan mengenai kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pada masa demokrasi liberal, kemudian memaparkan faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut, dan memaparkan dampak kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pada masa demokrasi liberal. Kebijakan-kebijakan dipaparkan secara berurutan sesuai dengan kabinet yang berkuasa. Salah satu kebijakannya ialah pemberdayaan ekonomi pribumi dengan memberikan pelatihan-pelatihan ekonomi dan perlindungan terhadap ekonomi pribumi dengan memberikan dukungan usaha seperti mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian skripsi tersebut terletak pada kebijakan yang dibahas, kebijakan yang dipaparkan mencakup seluruh kabinet dari tahun 1956-1960. Sementara penelitian ini lebih fokus pada satu kebijakan saja, yaitu Kebijakan Ekonomi Assaat pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II. Sedangkan persamaannya terletak pada pemaparan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.³²

Historiografi yang relevan ketiga ialah sebuah buku yang merupakan sumber sekunder untuk penelitian ini, yaitu buku karya Herbert Feith tahun 2007 yang berjudul *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing. Buku tersebut diawali dengan pembahasan penjajahan Belanda di Indonesia hingga Indonesia merdeka pada 1945. Kemudian terdapat perubahan dari segi kondisi politik masyarakat Indonesia, dari masyarakat kolonial menjadi masyarakat yang lebih tercerahkan oleh politik. Selanjutnya buku tersebut membahas mengenai kabinet-kabinet pada masa demokrasi parlementer secara terperinci. Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II tercetuslah

³² Nani Julita, *Sejarah Perekonomian Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1956-1960* (Skripsi) (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018), hlm. 28.

gagasan Mr. Assaat yang ternyata mendapat dukungan dari para pemimpin politik dan kabinet saat itu. Namun ada pula yang tidak setuju karena dikhawatirkan akan terjadinya ledakan politik.³³ Perbedaan buku tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada pandangan peneliti terhadap penelitiannya. Peneliti buku tersebut memandang bahwa demokrasi parlementer sesuai dengan masyarakat Indonesia yang merupakan adaptasi dari sistem yang sukses diterapkan di Barat, sementara peneliti ini memandang bahwa demokrasi parlementer kurang sesuai dengan masyarakat Indonesia karena kenyataannya banyak kebijakan-kebijakan yang tidak tertuntaskan. Sedangkan persamaannya terletak pada pembahasan kebijakan ekonomi masa demokrasi parlementer.

Historiografi yang relevan keempat ialah artikel ilmiah karya I Gusti Ag. A. Mas Triwulandari dan I Nyoman Budiana tahun 2018 yang berjudul Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*.Vol.1(1) Artikel ilmiah tersebut memaparkan mengenai nasionalisasi perusahaan asing dengan tujuan kemakmuran rakyat. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan berhasil dilakukan, namun permasalahan lain muncul karena kurangnya pengalaman dari aparaturnegara dalam melaksanakan dan mengawasi rencana tersebut secara birokratis. Perbedaan artikel ilmiah dengan penelitian ini terdapat pada batasan pembahasan, pembahasan dalam artikel mengenai nasionalisasi cenderung luas, sedangkan penelitian ini pembahasannya spesifik pada nasionalisasi asing sebagai wujud dari program kabinet Ali Sastroamidjojo II yang kemudian didukung oleh gagasan Mr. Assaat. Sedangkan persamaannya terletak pada nasionalisasi sebagai upaya memakmurkan rakyat Indonesia.³⁴

Historiografi yang relevan kelima ialah artikel ilmiah karya Nur Hidayah dan Retno Winarni tahun 2014 yang berjudul Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Jember Dari Zaman Orde Lama Sampai Zaman

³³ Herbert Feith, *loc. cit.*

³⁴ I Gusti Ag.A. Mas Triwulandari dan I Nyoman Budiana, Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia. (*Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), 2018), hlm. 12.

Reformasi Pada Tahun 1998-2012. *Jurnal Publika Budaya* Vol.2(2). Artikel ilmiah tersebut memaparkan mengenai nasionalisasi perusahaan asing, namun kaum pribumi kurang berpengalaman karena terlalu disibukkan dengan urusan militer dalam rangka mengusir penjajah dari Indonesia dan menumpas pemberontak pasca kemerdekaan serta terlalu sibuk dengan urusan politik dalam rangka melaksanakan demokrasi di Indonesia. Akibat dari hal tersebut memberikan peluang terhadap etnis Tionghoa untuk menguasai sektor perekonomian. Perbedaan artikel ilmiah tersebut dengan penelitian ini terletak pada munculnya tokoh negara sebagai pencetus kebijakan perekonomian yaitu Mr. Assaat. Sedangkan persamaannya ialah terletak pada diberlakukannya Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959 sebagai upaya melindungi perekonomian pribumi.³⁵

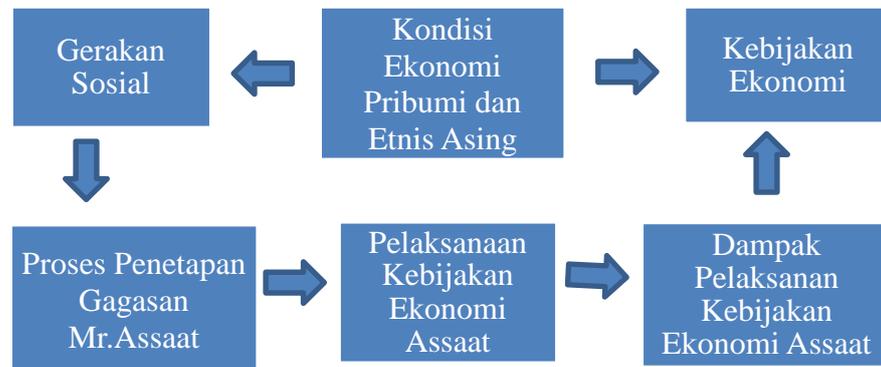
1.5.4 Kerangka Konseptual

Kondisi perekonomian antara etnis Tionghoa dan pribumi pada 1956-1959 sangat jauh berbeda. Persaingan dalam bidang perekonomian yang terjadi antara etnis Tionghoa dan pribumi pada masa tersebut ternyata telah memunculkan kebijakan perekonomian, yaitu Kebijakan Ekonomi Assaat. Kebijakan ini dilaksanakan pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II sebagai implementasi dari salah satu program kerjanya, yaitu mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.³⁶ Kebijakan tersebut berimbas pada usaha etnis Tionghoa karena mereka dianggap sebagai pengusaha asing. Sementara itu, etnis Tionghoa memiliki kemampuan yang lebih mumpuni dalam bidang perekonomian dan memiliki pengalaman sebagai perantara perdagangan dengan Kolonial Belanda. Sebenarnya, dari kalangan pribumi pun terdapat orang-orang yang terampil, namun masih sedikit yang berpengalaman dan memiliki keterampilan, hal ini tidak sebanding dengan kekuatan etnis

³⁵ Nur Hidayah dan Retno Winarni, Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Jember Dari Zaman Orde Lama Sampai Zaman Reformasi Pada Tahun 1998-2012 (*Jurnal Publika Budaya*, 2(2), 2014), hlm. 22-24.

³⁶ Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik Hingga Kini* (Jogjakarta: Diva Press, 2014), hlm. 375.

Tionghoa. Hal ini ditambah dengan sikap etnis Tionghoa yang dianggap tidak memberi ruang atau monopolistis dalam perekonomian.³⁷



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual di atas menjelaskan bahwa kondisi perekonomian yang demikian telah menimbulkan gerakan sosial guna melindungi perekonomian pribumi, disisi lain juga sebagai bentuk pemerataan keadilan dalam bidang perekonomian. Mr. Assaat sebagai salah satu tokoh negara, melihat kondisi demikian menggerakkan pikirannya untuk menggagas suatu gerakan yang dikenal sebagai Gerakan Assaat dan disambut dengan pro kontra, namun dengan kenyataan perekonomian yang ada, maka gagasan Mr. Assaat kemudian ditetapkan secara resmi ke dalam Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959 menjadi sebuah kebijakan ekonomi. Pelaksanaan kebijakan tersebut menimbulkan reaksi dari masyarakat dan pemerintah. Pelaksanaan dilakukan oleh militer, terjadi kerusuhan-kerusuhan dan menimbulkan sikap anti etnis Tionghoa. Kebencian pribumi terhadap etnis Tionghoa tidak dapat dihindarkan, seperti emosi yang tersimpan rapi, seolah menemukan momen yang tepat untuk meluapkan emosi yang selama ini dipendam. Hal ini dapat dilihat dalam sejarahnya, sejak jaman kolonial-pun pembagian kelas-kelas sosial terjadi di negeri ini. Tentu orang-orang

³⁷ Ratna Puspitasari, *loc. cit.*

Eropa, termasuk Belanda ditempatkan pada posisi paling atas, kemudian etnis Tionghoa, dan terakhir kaum pribumi. Etnis Tionghoa yang menempati posisi lebih tinggi dari pribumi pada masa Hindia Belanda, serta berbagai permasalahan seolah tidak pernah selesai meski telah berganti pemerintahan.³⁸

Sentimen anti etnis Tionghoa di Indonesia sebenarnya bukanlah sebuah hal yang baru. Pada awalnya relasi antara etnis Tionghoa dan pribumi merupakan sebagai rekan dagang dan mitra bisnis. Keadaan menjadi berbeda ketika Belanda datang dengan perusahaan dagangnya, yaitu VOC. Belanda memanfaatkan etnis Tionghoa sebagai rekan bisnis dan mendapat perlakuan yang eksklusif. Perlakuan eksklusif tersebut diantaranya dalam penempatan kelas sosial yang menempatkan etnis Tionghoa ke dalam kelas kedua, sementara pribumi ke dalam kelas ketiga.³⁹

Etnis Tionghoa mendapatkan imbas yang begitu buruk, sampai-sampai Pemerintah Tiongkok mengambil tindakan serius dengan memberi tawaran pada orang-orang Tionghoa yang terdampak supaya kembali ke RRT. Pada akhir tahun 1959 dilaksanakannya Kebijakan Ekonomi Assaat, pihak tentara memindahkan orang-orang Tionghoa secara paksa dari pedesaan ke kota-kota bahkan banyak diantara mereka yang dipulangkan ke negara Tiongkok.⁴⁰ Hubungan pemerintah Tiongkok dan Indonesia sempat tegang, pihak Indonesia menjelaskan bahwa implemetasi Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959 bukan sebagai diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, peraturan tersebut melainkan merupakan salah satu bentuk dari nasionalisasi perekonomian Indonesia. Baik etnis Tionghoa maupun pribumi menginginkan sebuah keadilan namun dalam pelaksanaan yang berbeda.⁴¹ Padahal sebelumnya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok terjalin baik, hal ini dibuktikan dengan kunjungan Soekarno ke Tiongkok pada 30 September 1956 disambut hangat oleh pemerintah Tioongkok.

³⁸ Yeni Wijayanti, *loc. cit.*

³⁹ M. Zahrin Piliang. Wajah Kapitalisme Dalam Perekonomian Indonesia (*Attanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 2022), hlm. 7.

⁴⁰ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 528.

⁴¹ Ratna Puspitasari, *loc. cit.*

Bahkan pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa Tiongkok dan Indonesia memiliki tujuan yang sama yaitu melawan kolonialisme.⁴²

1.6 Metode Penelitian Sejarah

1.6.1 Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani yakni *heuriskein* yang artinya menemukan. Sehingga dapat dipahami bahwa *heuristic* merupakan tahapan mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber untuk dapat mengetahui segala peristiwa sejarah yang relevan dengan penelitian. Secara singkat, heuristik digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.⁴³ Sumber primernya ialah Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959 Tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Ketjil dan Etjeran Jang Bersifat Asing Di Luar Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Dan II Serta Karesidenan, sumber tersebut penulis akses melalui ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) secara online dari situs resmi ANRI. Kemudian sumber sekunder terdiri dari buku fisik dan *e-book* serta artikel ilmiah yang diakses secara online.

Adapun sumber-sumber sekunder yang penulis gunakan ialah sebagai berikut:

1. Herbert Feith, 2007. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing.
2. M. C. Rikclefs, 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu.
3. Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
4. Ratna Puspitasari. 2014. Multikulturalisme Dalam IPS: Pengenalan Etnis Tionghoa Dalam Integrasi Bangsa (Studi Kritis Kajian Gender Antar Etnis Indonesia), *Jurnal Edueksos*, III(2). 1-24.

⁴² Swadesta Arya Wasesa, *Soekarno Dipuja, "Dibunuh", dan Dikekang* (Jogjakarta: Trans Idea Publishing, 2017), hlm. 134.

⁴³ Wulan Juliani Sukmana, *Metode Penelitian Sejarah (Seri Publikasi Pembelajaran, 1(2)*, 2021), hlm. 3.

5. Lukiyati Ningsih dan Sarkawi B. Husain. 2019. Komunitas Tionghoa Dalam Pusaran Politik: Aktivitas Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Mojokerto, 1959-1980. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budya*, 14(2). 1-10.

1.6.2 Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan kegiatan meneliti sumber dan informasi. Penelitian tersebut dilakukan secara kritis yang terdiri atas kritik eksternal dan kritik internal.⁴⁴ Kritik eksternal bertujuan untuk mengetahui keaslian sumber, contohnya, meneliti sebuah dokumen tahun 50-an, dokumen tersebut kertasnya telah menguning, gaya huruf, tinta, kalimat-kalimat, serta ungkapan-ungkapannya sesuai dengan tahun 50-an. Sehingga peneliti yakin bahwa sumber tersebut memang berasal dari tahun 50-an. Kritik eksternal disebut juga autentisitas, yaitu keaslian sumber. Sedangkan kritik internal dilakukan untuk menelisik kesesuaian isi dari sumber tersebut dengan fakta-fakta yang ada. Kritik internal dapat dibantu dengan mencari sumber-sumber yang relevan dengan penelitian guna mengungkapkan kesesuaian fakta. Kritik internal disebut juga sebagai kredibilitas.⁴⁵

Autentisitas atau keaslian sumber terutama sumber primer yang peneliti dapatkan dari ANRI secara online telah dipastikan bahwa arsip tersebut merupakan arsip asli. Dengan pertimbangan kertas yang menguning merupakan khas pada jaman dulu, gaya huruf, dan kalimat-kalimat yang khas. Arsip tersebut merupakan arsip yang dibuat pada tahun 50-an. Kemudian walaupun didapatkan secara online, peneliti mengaksesnya dari situs resmi ANRI sehingga terjamin keasliannya.

Kredibilitas, peneliti menggunakan literatur-literatur pendukung berupa buku maupun artikel ilmiah yang selaras dengan penelitian. Berdasarkan artikel ilmiah tersebut, bahwa benar adanya pada tahun 1959 terdapat pelaksanaan Peraturan Presiden RI No.10 Tahun 1959. Kesesuaian tersebut terdiri dari tahun,

⁴⁴ Nina Herlina, *Metode Sejarah Edisi Revisi 2020* (Bandung: Satya Historika, 2020), hlm. 30.

⁴⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 77-78.

pelaksanaan kebijakan, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumber sekunder juga menyinggung mengenai Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959.

1.6.3 Interpretasi

Tahapan selanjutnya ialah Interpretasi. Interpretasi dilakukan setelah kritik terhadap sumber-sumber yang telah didapatkan atau verifikasi. Sejarawan akan memasuki tahap penafsiran. Tahap ini menjadi penting karena merupakan tahap akhir yang ditempuh sebelum melakukan penulisan. Pada tahap ini, sumber sejarah yang telah berhasil dikritik dan telah pasti dijadikan sebagai bahan untuk penulisan sejarah dan akan ditafsirkan. Kuntowijoyo berpendapat bahwa seorang sejarawan harus dapat membayangkan apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Apabila dalam diri sejarawan telah terdapat imajinasi maka lebih mudah baginya untuk dapat merangkai fakta-fakta tersebut.⁴⁶

Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang subjektifitas. Pernyataan tersebut bisa dibilang benar dan juga salah. Benar karena data dapat berbicara merupakan hasil dari penafsiran para sejarawan. Walau subjektifitas dalam penafsiran begitu rentan, namun sumber-sumber yang telah diverifikasi harus ditafsirkan agar dilaksanakannya penulisan. Sehingga, tulisan tersebut dapat sampai kepada masyarakat. Kemudian salah karena subjektifitas sering kali mengaburkan fakta-fakta lain yang seharusnya diungkap. Sejarawan yang jujur tentu selalu mencantumkan data dan keterangan dari mana data-data tersebut diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang berdasarkan pemahaman dan sudut pandangnya masing-masing. Subjektifitas penulisan sejarah diakui, tetapi untuk dihindari. Interpretasi terdapat dua macam, yaitu analisis dan sintesis.⁴⁷

Analisis yang dilakukan ialah mengenai sumber primer. Analisis dalam kegiatan interpretasi merupakan proses menguraikan. Sumber primer yang digunakan ialah sebuah arsip yang diakses dari ANRI secara online yaitu,

⁴⁶ Wulan Juliani Sukmana, *loc. cit.*

⁴⁷ Kuntowijoyo, *op. cit.* hlm. 78-80.

Peraturan Presiden RI. No. 10 Tahun 1959 Tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Ketjil dan Etjeran Jang Bersifat Asing Di Luar Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Dan II Serta Karesidenan, dalam arsip tersebut disebutkan bahwa yang dilarang untuk berjualan ialah orang-orang asing. Tidak menyebutkan atau menyorot salah satu etnis di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Wijayanti⁴⁸ bahwa setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, belum ada suatu kebijakan resmi menyangkut ekonomi Indonesia. Sementara itu, kedudukan orang Tionghoa mendapat tempat yang sama seperti orang penduduk pribumi asli. Sejarah kehidupan masa kolonial dan sentimenlah yang menjadikan kedua golongan tersebut seolah berada di tempat yang berbeda.

Sintesis merupakan proses untuk menyatukan peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga dapat disimpulkan peristiwa apakah yang terjadi. Pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959 ternyata menimbulkan kerusuhan terhadap etnis Tionghoa. Peraturan tersebut pada awalnya untuk melindungi perekonomian kaum pribumi, pelaksanaan dilakukan oleh militer telah terjadi kerusuhan dan sentimen anti etnis Tionghoa. Mr. Assaat sebagai penggagas telah melakukan gerakan sosial karena dengan perencanaan yang terukur, hal ini guna memberikan keadilan terhadap masyarakat Indonesia. Peraturan Presiden RI No.10 Tahun 1959 yang muncul akibat dari gagasan Mr. Assaat yang kemudian lebih dikenal dengan Gerakan Assaat pada kenyataannya menitikberatkan pada nasionalisasi usaha-usaha milik etnis Tionghoa.

1.6.4 Historiografi

Historiografi adalah hasil atau karya dalam penulisan sejarah atau sarana untuk mengkomunikasikan hasil penelitian yang telah diungkap, diuji, dan diinterpretasi. Berdasarkan pengertian ini dapat dipahami bahwa peristiwa sejarah memerlukan penelitian sebelum disajikan dalam bentuk historiografi. Historiografi dapat dihasilkan melalui penelitian sejarah. Proses penulisan sejarah

⁴⁸ Yeni Wijayanti, *loc. cit.*

tergantung pada kemampuan sejarawan atas teori dan metodologi yang mereka pahami dan kuasai.⁴⁹

Kronologi merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting dalam historiografi. Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian: 1) Pengantar, dalam pengantar dikemukakan latar belakang, teori atau konsep yang dipakai, dan sumber-sumber sejarah. Unsur-unsur tersebut disertai dengan argumen-argumen peneliti. 2) Hasil Penelitian, berisikan bab-bab yang berisi hasil penelitian yang merepresentasikan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian. 3) Simpulan, mengemukakan *generalization* dari yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Penulis menyajikan hasil penelitian dengan melakukan proses penulisan yang sesuai dengan panduan yang berlaku. Penyajian hasil penelitian terdiri dari 5 bab yang kemudian akan diuraikan pada sistematika pembahasan.⁵⁰

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

BAB I, terdiri atas 8 sub-bab yaitu: latar belakang masalah yang memaparkan secara umum permasalahan yang akan diteliti, penjelasan singkat mengenai masalah yang akan diteliti, dan alasan penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Kemudian terdapat rumusan masalah yang terdiri dari 1 pertanyaan dan pertanyaan penelitian yang terdiri dari 3 pertanyaan yang akan menjadi pembahasan pada BAB II, BAB III, dan BAB IV. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian yang merupakan turunan dari pertanyaan penelitian dan berbentuk pernyataan. Kemudian manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoretis, manfaat praktis, dan manfaat empiris. Sub-bab selanjutnya ialah tinjauan teoretis yang terdiri dari 3 pembahasan yaitu, kajian teori, historiografi yang relevan, dan kerangka konseptual. Terdapat 2 teori yang digunakan dalam kajian teoritis, yaitu: Gerakan Sosial dan Kebijakan Ekonomi yang diuraikan secara argumentatif dengan mengaitkan teori dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁴⁹ Wulan Juliani Sukmana, *op. cit.* hlm. 2-4.

⁵⁰ Kuntowijoyo, *op. cit.* hlm. 80-82.

Kemudian terdapat historiografi yang relevan terdiri dari 1 buah buku, 1 buah skripsi, dan 3 buah artikel ilmiah, dipaparkan secara singkat mengenai masing-masing pembahasan tersebut serta memaparkan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya ialah kerangka konseptual yang ditunjang dengan tabel untuk memudahkan dalam memahami kerangka berpikir. Kerangka konseptual menjelaskan secara ringkas mengenai kerangka berpikir penelitian ini sehingga penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Sub-bab selanjutnya ialah metodologi sejarah yang terdiri dari heuristik (pengumpulan sumber), yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari arsip Nasional Republik Indonesia yang diakses pada situs resmi ANRI. Sedangkan sumber sekunder diperoleh melalui buku fisik dan *e-book* serta artikel ilmiah yang diperoleh secara online. Kemudian kritik sumber untuk memastikan keotentikan sumber (kritik ekstern) dan untuk memastikan kredibilitas sumber (kritik intern). Selanjutnya ialah tahap penafsiran, dalam hal ini perlu kehati-hatian agar tidak terjadi subjektifitas yang berlebihan. Selanjutnya tahap Interpretasi yang dibagi menjadi 2, yaitu analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan). Tahap terakhir ialah historiografi (penulisan sejarah), merupakan upaya untuk menyampaikan atau menyajikan hasil penelitian sejarah yang telah melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Sub-bab terakhir ialah sistematika penelitian yang memaparkan secara berurutan mengenai urutan penelitian, penyajian hasil penelitian, dan penutup.

BAB II Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini kemudian diuraikan pada BAB II, III, dan IV. Pembahasan berkaitan erat dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Dengan ini diharapkan pada BAB II dapat mengungkap pertanyaan-pertanyaan yang telah disajikan. Dengan kata lain, pada bab ini penulis akan menuangkan hasil penelitiannya dengan melakukan penulisan sejarah (historiografi). Pembahasan pada BAB II ialah mengenai kondisi perekonomian masyarakat tahun 1956-1959. Masyarakat yang dimaksud ialah pribumi dan etnis asing. Pada

BAB II akan disajikan dalam dua sub-bab, yaitu kondisi perekonomian pribumi tahun 1956-1959 dan kondisi perekonomian etnis asing tahun 1956-1959. Kedua sub-bab tersebut disajikan sebagai bahan analisis dari tercetusnya gagasan Mr. Assaat pada 1956.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Pembahasan pada BAB III ialah proses penetapan gagasan Mr. Assaat menjadi Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959 yang terdiri atas dua sub-bab yaitu gagasan Mr. Assaat tahun 1956 dan penetapan kebijakan Ekonomi Assaat.

BAB IV Pembahasan

Pembahasan pada BAB IV menyajikan mengenai reaksi terhadap pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Assaat 1959 yang terdiri atas dua sub-bab yaitu, awal mula pelaksanaan kebijakan ekonomi Assaat 1959 dan dampak pelaksanaan kebijakan ekonomi Assaat 1959. Pada BAB IV ini akan dipaparkan mengenai terdapatnya kerusuhan yang terjadi akibat dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu juga terdapat pemerintah Tionghoa yang mengajukan protes atas pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959.

BAB V Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan terdapat juga saran yang ditujukan untuk para pembaca dan pemerintah masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi mengenai sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Terdiri dari sumber primer dan sekunder yang disusun secara alfabetis. Sumber tersebut diperoleh secara online dan offline berupa dokumen arsip, buku, *e-book* dan artikel ilmiah. Sumber-sumber tersebut disusun mulai dari dokumen arsip, buku referensi, dan artikel ilmiah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran terdiri dari gambar, daftar riwayat hidup penulis, Kartu Bimbingan, dll.

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah salah satu kebijakan ekonomi pada masa demokrasi parlementer, yaitu Kebijakan Ekonomi Assaat. Penelitian ini tentu saja perlu adanya batas temporal dan spasial supaya fokus penelitiannya lebih spesifik dan menghindari dari terlalu melebarnya penelitian di luar fokus penelitian. Batas temporal penelitian ini adalah dari tahun 1956 sampai tahun 1959, sedangkan batas spasialnya mengikuti batas temporalnya, terdiri dari kota-kota yang terdampak atas diberlakukannya Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959, terutama Jakarta.

1.7.2 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu masalah yang akan diteliti. Masalah tersebut akan diteliti menggunakan teori-teori yang telah peneliti tetapkan. Objek dari penelitian ini adalah Gagasan dan Kebijakan Ekonomi Assaat 1956-1959 yang kemudian dituangkan secara resmi dalam Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959, kemudian yang akan dikaji menggunakan teori gerakan sosial dan teori kebijakan ekonomi. Hal ini karena awal mula munculnya Kebijakan Ekonomi Assaat diawali dengan adanya gagasan yang kemudian menjadi gerakan sosial, yaitu Gerakan Assaat. Teori ekonomi digunakan karena kebijakan tersebut termasuk dalam kebijakan ekonomi. Adapaun subjek penelitian berupa data-data tertulis yang peneliti peroleh dari lapangan. Data-data tersebut bersumber dari dokumen arsip, buku-buku, dan artikel ilmiah, sumber-sumber tersebut akan menjadi acuan bagi peneliti dalam proses penelitian.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah untuk memperoleh data. Hal ini menjadi salah satu langkah yang paling penting bagi peneliti, karena dengan datalah penulis dapat mengungkapkan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dicantumkan pada BAB I. Penulis menggunakan teknik studi pustaka, hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku dan artikel ilmiah yang diakses secara online dan offline. Setelah penulis mengumpulkan sumber-sumber

rujukan, penulis menulis sumber dengan cara sistem kartu. Sistem kartu memudahkan penulis dalam mengolah data. Hal ini karena sistem kartu dibuat dengan lembaran-lembaran kartu untuk menuliskan intisari pembahasan yang akan dicantumkan dalam skripsi, dan juga dengan mencantumkan identitas buku serta halamannya.

1.7.4 Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian memerlukan langkah-langkah penelitian supaya penelitian dapat berjalan secara sistematis. Langkah-langkah penelitiannya ialah sebagai berikut:

1. Memilih Masalah

Langkah penelitian pertama yang penulis lakukan adalah memilih masalah. Pemilihan masalah harus dengan berbagai pertimbangan yaitu, permasalahan harus berkaitan dengan kajian ilmu sejarah, hal ini sesuai dengan pendidikan yang sedang penulis tempuh, yaitu pendidikan sejarah. Selanjutnya ialah penulis mempertimbangkan ketertarikan pada salah satu kajian dalam ilmu sejarah yaitu, mengenai perekonomian pada masa demokrasi parlementer. Penulis mengkrucutkannya pada satu kebijakan yaitu Kebijakan Ekonomi Assaat 1956-1959. Selanjutnya penulis mempertimbangkan ketersediaan sumber pada kajian tersebut, baik sumber secara offline maupun online. Setelah mempertimbangkan ketiga hal tersebut, penulis mengajukan judul kepada dosen pembimbing yaitu, Kebijakan Ekonomi Assaat 1956-1959.

2. Studi Pendahuluan

Penulis melakukan studi pendahuluan bertujuan untuk memperoleh dan mempelajari sumber yang telah didapat baik secara *offline* maupun *online*. Penulis melakukan studi pendahuluan dengan mengunjungi perpustakaan dan media online dengan sumber rujukan berupa dokumen arsip, buku, dan artikel ilmiah. Hal ini dilakukan supaya penulis mendapatkan sumber dari berbagai sudut pandang dan dapat mengungkap masalah secara jelas.

3. Merumuskan Masalah

Setelah penulis selesai melakukan studi pendahuluan, maka dirumuskanlah permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut yang akan penulis ungkap dan akan penulis sajikan pada BAB II, BAB III, dan BAB IV. Merumuskan masalah sangatlah penting, hal ini supaya permasalahan yang akan diteliti menjadi jelas dan tidak melebar pada pembahasan di luar penelitian.

4. Merumuskan Anggapan Dasar

Anggapan dasar dirumuskan berdasarkan pada asumsi-asumsi penulis yang diperoleh pada saat teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Selain itu juga, anggapan dasar berdasar pada objek penelian yang akan diteliti. Hal ini karena anggapan dasar merupakan sesuatu yang kebenarannya diyakini oleh penulis sebagai acuan dari pelaksanaan penelitiannya.

5. Memilih pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan historis. Pendekatan tersebut sesuai pada penelitian ini karena objek penelitiannya merupakan bagian dari ilmu sejarah. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk menggunakan prosedur penelitian sejarah yang mengacu pada sumber rujukan berupa buku.

6. Menentukan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, artikel ilmiah dan arsip. Ketiga sumber tersebut merupakan sumber yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis memperoleh sumber-sumber tersebut secara offline dan online. Sumber-sumber terbagi atas 3 bagian yaitu, buku referensi, artikel ilmiah, dan dokumen arsip. Sumber primer yang digunakan adalah arsip yaitu, Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959 yang diakses secara online dari website resmi ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia). Sedangkan sumber sekundernya berupa buku dan artikel ilmiah.

7. Mengumpulkan Data

Penulis melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa perpustakaan baik secara offline maupun online. Data yang diperoleh merupakan data yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, data-data tersebut berupa arsip, buku, dan artikel ilmiah. Penulis melakukan pengumpulan data

untuk memperoleh data-data dari objek penelitian dan teori-teori yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini.

8. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan supaya permasalahan yang akan diteliti menjadi spesifik. Setelah itu penulis melakukan analisis data, analisis data dilakukan salah satunya untuk pemecahan masalah. Analisis data dapat menjadikan penulis tahu hal apa saja yang perlu disampaikan dalam penelitian ini.

9. Menarik Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan setelah melalui langkah-langkah sebelumnya. Data yang telah diolah akan dicocokkan dengan asumsi awal penulis. Jika asumsi awal penulis relevan dengan data-data yang telah diolah, maka asumsi penulis dapat dikatakan kredibel.

10. Menulis Laporan

Penulisan laporan menjadi langkah terakhir dalam langkah-langkah penelitian. Setelah menarik kesimpulan, maka penulis menyusun laporan dari data-data yang sebelumnya telah diolah. Penulis menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dewan Bimbingan Skripsi (DBS) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).